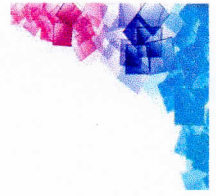


CAPAIAN KINERJA



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG

2024

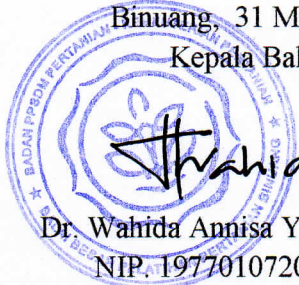


KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (Lakin) Triwulan I Tahun 2024 merupakan laporan serangkaian kegiatan pelatihan beserta kinerja Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang dalam rentang periode Januari s.d. Maret Tahun 2024. Di periode tersebut BBPP Binuang sebagai UPT pelatihan pertanian BPPSDMP Kementan senantiasa berupaya untuk membangun konteks pelatihan yang didasari oleh relevansi *ter-up to date* seperti *climate change*, *Youth Entrepreneur and Employment Support Services* (YESS) dll dengan tata kelola yang luhur dan sistematis serta dapat menginspirasi semua *stakeholders* pertanian.

BBPP Binuang juga berkomitmen memfasilitasi pengembangan SDM Pertanian baik institusi, lembaga P4S, ataupun kelompok tani di regional Kalimantan. Dengan kegiatan dan apresiasi yang telah dicapai di periode ini kami berharap kinerja yang akan datang dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan potensi dan peluang yang tersedia, serta mengatasi semaksimal mungkin permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai kinerja yang lebih baik. Besar harapan kami Laporan Kinerja BBPP Binuang Triwulan I Tahun 2024 ini dapat memberikan gambaran kinerja Balai dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Binuang, 31 Maret 2024
Kepala Balai

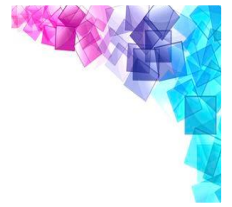


Dr. Wahida Annisa Yusuf, SP, M.Sc
NIP. 197701072002122002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kondisi Umum BBPP Binuang	4
C. Isu Strategis.....	15
D. Dukungan Anggaran	21
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	23
a. Visi	23
b. Misi	23
c. Tujuan	23
d. Sasaran Strategis	24
e. Kebijakan Strategis Tahun 2021 - 2024.....	25
f. Program Kegiatan.....	26
g. Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	26
B. Perjanjian Kinerja.....	27
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Kriteria Ukuran Keberhasilan	29
B. Capaian Kinerja Organisasi.....	29
C. Capaian Perjanjian Kinerja.....	41
D. Capaian Kinerja Lainnya	42
E. Rekomendasi dan Tindak Lanjut	45
BAB IV. PENUTUP	
LAMPIRAN	



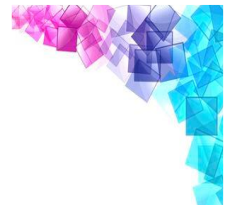
DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Hal
1.	Sebaran, Jumlah dan Klasifikasi P4S Tahun 2024	11
2.	Anggaran BBPP Binuang Triwulan I Tahun 2024	21
3.	Perjanjian Kinerja BBPP Binuang Tahun 2024.....	27
4.	Capaian Indikator Pelatihan Triwulan I Tahun 2024.....	30
5.	Pengolahan Data Kuisisioner IKM BBPP Binuang	37
6.	Realisasi Kinerja BBPP Binuang Triwulan I Tahun 2024.....	39
7.	Realisasi Perjanjian Kinerja BBPP Binuang TA 2021 - 2024	41
8.	Realisasi PNPB BBPP Binuang Triwulan I Tahun 2024	43



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Hal
1.	Struktur Organisasi BBPP Binuang	7
2.	Komposisi Pegawai BBPP Binuang Berdasarkan Golongan.....	8
3.	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	8
4.	Persentase Pagu Anggaran BBPP Binuang.....	22
5.	Jumlah Aparatur Pertanian Yang Terlatih	32
6.	Jumlah Non Aparatur Pertanian Yang Terlatih.....	33
7.	Realisasi Anggaran BBPP Binuang Triwulan IV Tahun 2022.....	39
8.	Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BBPP Triwulan IV Tahun 2023	41



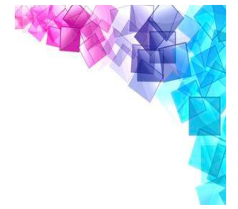
BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Tahun 2024 Kementerian Pertanian (Kementan) saat ini tengah menghadapi tantangan pangan yang bersifat multidimensi. Kementan terus berupaya menjaga ketersediaan, akses dan konsumsi pangan hingga nilai tambah serta daya saing industri sektor pertanian. Menteri Pertanian Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P. optimis Indonesia bisa kembali swasembada pangan pada dua hingga tiga tahun ke depan. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo agar swasembada pangan bisa tercapai diantaranya dengan meningkatkan produksi dalam negeri. Mentan mengungkapkan bahwa pihaknya akan fokus dalam memperkuat produksi berbagai komoditas strategis dalam satu tahun ke depan. Mentan Amran menambahkan bahwa untuk menekan angka impor beras, untuk sementara Indonesia tahun ini berencana mendatangkan sebanyak 3,5 juta ton beras.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Prof. Ir. Dedi Nursyamsi M.Agr mengatakan bahwa saat ini ada beberapa bahan pangan yang masih impor. Namun pemerintah terus memikirkan agar Indonesia mampu menyediakan pangan sendiri dan memanfaatkan pangan lokal. Kalau ditanya bagaimana suport BPPSDMP terhadap ketahanan, tentu kita support dari SDM nya. SDM pertanian itu ya petani, praktisi pertanian dan penyuluh pertanian, jelas Kepala BPPSDMP. *“Kita genjot agar mereka terus berproduksi dan penyuluh harus tetap turun ke lapang, ke sawah dan ladang untuk mendampingi petani tingkatkan produksi. Karena produksi tidak boleh delay, tidak boleh tertahan apalagi terlambat”*, tegasnya.

Selain hal tersebut di atas Kepala BPPSDMP Kementan, Dedi Nursyamsi, menyatakan mensupport penuh upaya peningkatan produksi pangan melalui optimalisasi lahan rawa. *“Young Ambassador Agriculture merupakan kegiatan pemilihan dan pelatihan petani atau pengusaha muda sektor pertanian dari seluruh Indonesia, untuk dapat menjadi duta Program YESS. Tujuannya mempromosikan dan mengajak kaum muda di wilayah Program YESS untuk terlibat secara aktif di sektor pertanian.”*



Beliau juga menjelaskan Youth Entrepreneur and Employment Support Services (YESS) adalah program kerja sama antara Kementerian Pertanian (Kementan) dengan International Fund For Agricultural Development (IFAD). *“Partisipasi aktif sasaran program yaitu petani muda terus didorong dalam rangka mencapai target tersebut,”* lanjutnya.

Sedang melalui program kerjasama edukasi pertanian untuk meningkatkan kapasitas SDM milenial melalui kerjasama kampus merdeka dan sekaloh/SMK, BBPP Binnang mengadakan program magang bagi mahasiswa dan siswa yang akan melakukan praktik kerja. Selama berada di BBPP Binnang mereka diberikan pelatihan berbagai keterampilan mulai dari memproduksi hasil pertanian, melakukan penanganan pasca panen, pengolahan hasil, pengemasan sampai pemasarannya. Mereka juga dikenalkan dan dilatih mengoperasikan berbagai alsintan yang ada di BBPP Binnang, di antaranya Alsintan untuk olah tanah baik traktor roda 4, traktor roda 2 maupun cultivator.

Untuk menyikapi tuntutan peningkatan kapasitas SDM pertanian yang jumlahnya sangat besar, khususnya bagi pelaku (non aparatur) pertanian, semenjak tahun 2006 sampai sekarang 2024, BBPP Binnang telah menumbuh kembangkan 158 unit Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) yang tersebar pada 5 (lima) Provinsi se-Kalimantan, terdiri dari Kalimantan Selatan (37 lembaga), Kalimantan Barat (27 lembaga), Kalimantan Utara (16 lembaga), Kalimantan Tengah (40 lembaga) dan Kalimantan Timur (38 lembaga).

Pengelola P4S adalah para petani maju dan berhasil yang diharapkan dapat mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki kepada petani sekitarnya, sehingga keberadaannya benar-benar dapat mendorong percepatan kebutuhan tuntutan peningkatan kapasitas SDM petani yang dilaksanakan melalui kegiatan permagangan/pelatihan. Pembinaan terhadap P4S selama ini yang telah dilakukan berupa mengikut sertakan kegiatan Pelatihan teknis agribisnis, manajemen, Instruktur, dan metodologi pelatihan bagi pengelola P4S, pemberian fasilitasi pendanaan/sharing kegiatan permagangan di P4S, serta pemberian sarana pendukung permagangan/pelatihan.



Demikian pula terhadap SDM aparatur bidang pertanian, pelaksanaan pelatihannya juga telah berusaha disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan kompetensi yang diharapkan, berbagai pelatihan teknis dan fungsional yang dilaksanakan baik biaya yang berasal APBN maupun biaya yang berasal dari pihak user (kerjasama pengguna jasa pelatihan), dilaksanakan dengan pengembangan pola dan metoda pelatihan, walaupun itu belum sepenuhnya dapat mengakomodir seluruh kebutuhan sasaran, sebagai tindak lanjutnya akan terus dikembangkan sehingga kedepan akan dimilikinya pilihan alternative model pelatihan yang dapat melengkapi dan mensinergikan program pusat dan daerah, sekaligus menjadi media sinkronisasi program pusat dan daerah.

B. Kondisi Umum BBPP Binuang

1. Tugas dan Fungsi

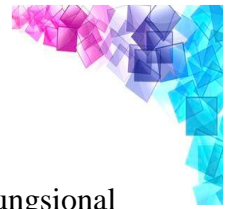
a. Tugas

Berdasarkan Permentan Nomor 106/ Permentan/ OT.140/10/2013, tanggal 9 Oktober 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang, mempunyai Tugas Pokok *“melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis dibidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian”*.

b. Fungsi

Sedangkan fungsi yang diselenggarakan antara lain:

- a) Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerja sama.
- b) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan.
- c) Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian.
- d) Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur.
- e) Pelaksanaan pelatihan teknis dibidang mekanisasi pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri.
- f) Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang mekanisasi pertanian bagi aparatur dan non aparatur.
- g) Pelaksanaan uji kompetensi di bidang pertanian.



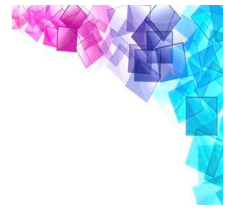
- h) Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian.
- i) Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang mekanisasi pertanian.
- j) Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya.
- k) Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian.
- l) Pelaksanaan bimbingan lanjutan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur.
- m) Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur.
- n) Pengelolaan Unit Inkubator Usaha Tani.
- o) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan dibidang pertanian.
- p) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan.
- q) Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis.
- r) Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan instalasi BBPP Binuang.
- s) Berdasarkan Permentan tersebut diatas, bahwa Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pelatihan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, dan sehari-hari dibina oleh Kepala Pusat Pelatihan Pertanian.

2. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

BBPP Binuang merupakan UPT Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, dengan Unit Kerja eselon II-b dipimpin oleh seorang Kepala Balai.

Kepala Balai, melaksanakan tugas pimpinan balai :

- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional dan dalam lingkup area kerja balai.
- Meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian.
- Meningkatkan tata kelola anggaran Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang.
- Meningkatkan Layanan BBPP Binuang.



Kepala Balai membawahi :

1) Kepala Bagian Umum :

- Meningkatkan kualitas layanan umum.
- Meningkatkan kepuasan publik atas layanan balai.
- Meningkatkan kepuasan internal layanan bagian umum.

Kepala Bagian Umum membawahi :

a. Ketua Tim Kerja Kepegawaian dan Tata Usaha :

- Melaksanakan layanan kepegawaian.
- Melaksanakan tugas manajerial kepegawaian dan RT sesuai penugasan.

b. Ketua Tim Kerja Rumah Tangga dan Baranga Milik Negara :

- Melaksanakan kegiatan layanan rumah tangga dan baranga milik negara yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan. .
- Melaksanakan penyelesaian tugas manajerial rumah tangga dan baranga milik negara sesuai penugasan.

c. Ketua Tim Kerja Keuangan :

- Melaksanakan kegiatan layanan keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan.
- Melaksanakan penyelesaian tugas manajerial keuangan sesuai penugasan.

2) Ketua Kelompok Substansi Program dan Evaluasi :

- Melaksanakan monitoring kinerja anggaran BBPP Binuang sesuai dengan LKE/rencana proyeksi.
- Melaksanakan kegiatan layanan program dan evaluasi yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan.
- Melaksanakan penyelesaian tugas manajerial sesuai penugasan.
- Melaksanakan peningkatan jumlah P4S dan peningkatan kelas klasifikasi P4S.

Ketua Kelompok Substansi Program dan Evaluasi membawahi :

a. Ketua Tim Kerja Program dan Kerjasama :

- Melaksanakan program dan kerjasama balai, dokumen kehumasan dan publikasi.
- Melaksanakan tugas manajerial program dan kerjasama sesuai penugasan.

b. Ketua Tim Kerja Evaluasi dan Laporan :



- Melaksanakan pemutakhiran data evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala.
- Melaksanakan dokumen layanan evaluasi dan pelaporan.
- Melaksanakan tugas manajerial evaluasi dan pelaporan sesuai penugasan.

3) Ketua Kelompok Substansi Penyelenggaraan Pelatihan :

- Melaksanakan kegiatan layanan penyelenggaraan pelatihan aparatur dan non aparatur yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan.

Ketua Kelompok Substansi Penyelenggaraan Pelatihan membawahi :

a. Ketua Tim Kerja Pelatihan Aparatur dan Nonaparatur

- Melaksanakan kegiatan layanan penyelenggaraan pelatihan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan pelatihan aparatur.

b. Ketua Tim Kerja Tim Kerja Sertifikasi Profesi, Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Inkubator Agribisnis

- Melaksanakan kegiatan layanan sertifikasi profesi, layanan konsultasi dan pengelolaan inkubator agribisnis.

4) Jabatan Fungsional

a. Widyaiswara

- Melaksanakan tatap muka pelatihan beserta presentase SDM Pertanian yang menerapkan materi pelatihan.
- Melaksanakan tatap muka pelatihan beserta tingkat kepuasan peserta terhadap Widyaiswara/Fasilitator pelatihan.

b. Analis Pengelolaan Keuangan APBN

- Melaksanakan kegiatan layanan Keuangan dan BMN yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan.

c. Arsiparis

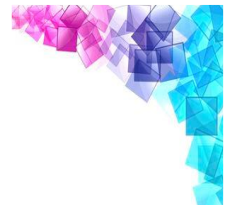
- Melaksanakan penataan arsip layanan balai.

d. Pranata Komputer

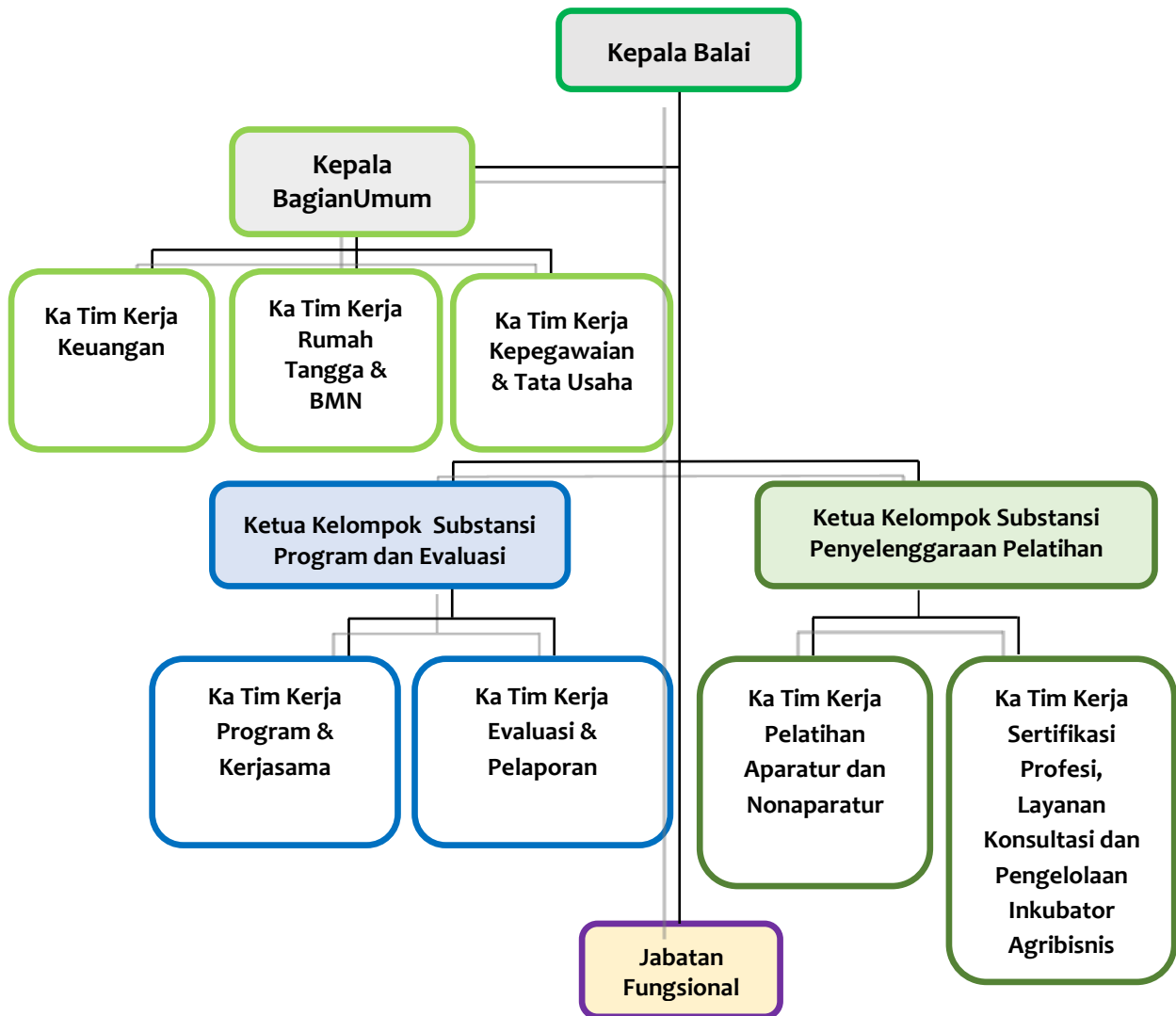
- Memberikan layanan teknologi informasi dan komunikasi.

e. Pengelola Perpustakaan

- Melakukan laporan layanan administrasi pada instalasi perpustakaan.



a. Struktur Organisasi



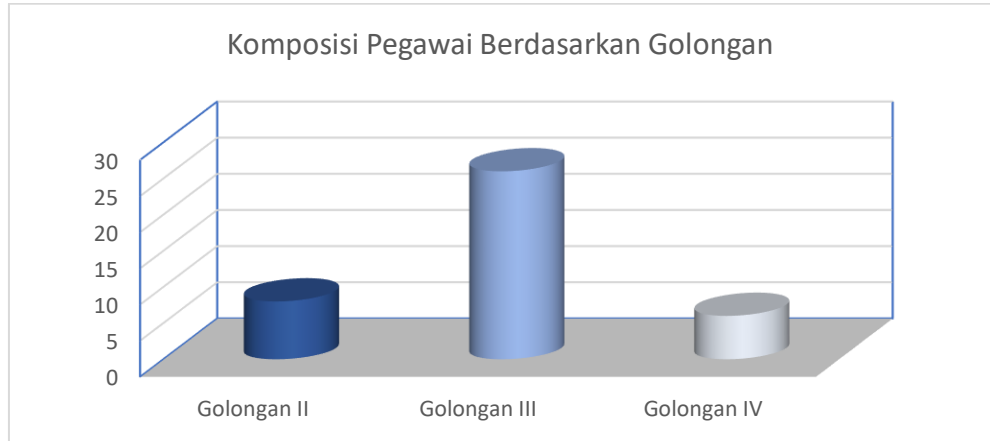
Gambar 1. Struktur Organisasi BBPP Binuang

b. Sumber Daya Manusia BBPP Binuang

Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya, BBPP Binuang didukung oleh 42 karyawan, dengan berstatus Pegawai Negeri Sipil sebanyak 40 orang aparat serta 2 orang aparat berstatus PPPK (data per 31 Maret 2024), yang terdiri atas 27 Aparat laki-laki dan 15 Perempuan. Komposisi pegawai BBPP Binuang Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan secara rinci sebagai berikut:

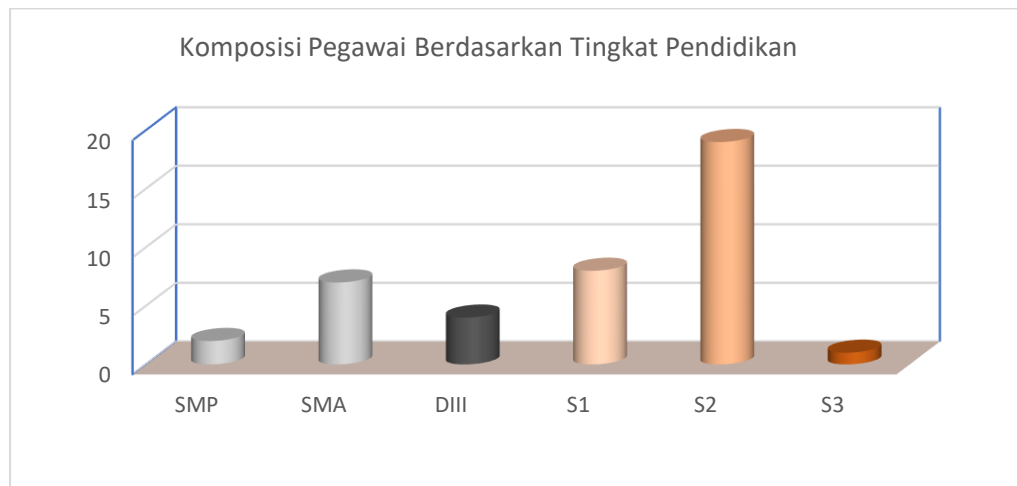


- a. Golongan, terdiri atas: golongan II sebanyak 8 orang, golongan III sebanyak 26 orang. Golongan IV sebanyak 6 orang dan PPPK golongan IX 2 orang. Komposisi pegawai BBPP Binuang Per 31 Maret 2024 berdasarkan golongan pada Gambar 2.

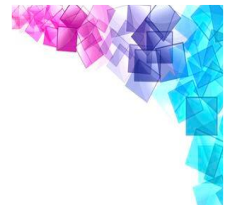


Gambar 2. Komposisi Pegawai BBPP Binuang Berdasarkan Golongan

- b. Tingkat Pendidikan, terdiri atas: S3 (doktoral) sebanyak 2 orang S2 (magister) sebanyak 19 orang, S1 (sarjana) sebanyak 8 orang, D3 (diploma) sebanyak 5 orang, SLTA sebanyak 6 orang, dan SLTP sebanyak 2 orang. Komposisi pegawai BBPP Binuang Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Komposisi Pegawai BBPP Binuang Berdasarkan Tingkat Pendidikan



A. Aspek Strategis dan Permasalahan utama (*strategic issued*)

1. Aspek Strategis

a. Sumberdaya Alam

- a) BBPP Binnang berada di lahan yang telah bersertifikat seluas 11,51 Hektar yang dilengkapi dengan fasilitas instalasi lahan praktek, sehingga sangat representative dalam penyelenggaraan pelatihan pertanian Teknis Tanaman Pangan, Perkebunan, Hortikultura, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Mekanisasi Pertanian, Tata Guna Air, serta kewirausahaan pertanian.
- b) Instalasi lahan praktek yang tersedia seluas 6,5 hektar dilengkapi dengan sistem irigasi semi teknis yang mengalir sepanjang tahun sehingga sangat memungkinkan untuk melakukan praktek budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan tanaman musiman.
- c) Secara demografi BBPP Binnang sangat strategis, mudah diakses melalui transportasi darat yang dekat dengan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dimana Kalimantan Selatan menjadi pintu masuk untuk semua provinsi di Kalimantan, serta Bandara Internasional Syamsuddin Noor, Banjarbaru.

b. Sumberdaya Kelembagaan

a) Organisasi dan Tata Kerja

BBPP Binnang merupakan UPT Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, dengan Unit Kerja Dipimpin oleh seorang Kepala Balai terdiri dari :
Kepala Bagian Umum membawahi :

- Ketua Tim Kerja Kepegawaian dan Rumah Tangga
- Ketua Tim Kerja Perlengkapan dan Instalasi
- Ketua Tim Kerja Keuangan

Ketua Kelompok Substansi Program membawahi :

- Ketua Tim Kerja Program dan Kerjasama
- Ketua Tim Kerja Evaluasi dan Laporan

Ketua Kelompok Substansi Penyelenggaraan membawahi :

- Ketua Tim Kerja Aparatur
- Ketua Tim Kerja Non Aparatur



b) Penguatan Kelembagaan Melalui Sertifikasi Integrasi Manajemen Mutu dan Manajemen Lingkungan (ISO 9001:2015, dan ISO 14001:2015)

Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001:2015), adalah bentuk konsisten manajemen untuk memberikan standard minimal terhadap pelayanan penyelenggaraan pelatihan pertanian di BBPP Binnuang secara konsisten, dan sertifikasi ISO 9001:2015 (manajemen mutu) mulai diterapkan dan diperoleh sertifikasinya sejak tahun 2007. Pada akhir tahun 2016 BBPP Binnuang telah mengintegrasikan sistem pelayanan tersebut dengan Sistem Manajemen Lingkungan, (Integrasi ISO 9001:2015 dengan ISO 14001:2015) secara berkelanjutan.

Hasil audit merekomendasikan BBPP Binnuang meraih sertifikat ISO 9001:2015 dan ISO 14001:2015, maka secara optimal dengan sumber daya yang tersedia untuk :

- Berkomitmen dalam usaha pencegahan pencemaran lingkungan.
- Berperan aktif dalam usaha pelestarian dan perbaikan alam.
- Senantiasa meningkatkan mutu pelayanan, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- Senantiasa memenuhi sasaran mutu dan lingkungan serta persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mendokumentasikan, menerapkan, memelihara, meninjau dan meningkatkan efektifitas sistem manajemen integrasi (ISO 9001-2015 dan ISO 14001-2015) secara berkelanjutan.
- Mengkomunikasikan system manajemen integrasi ini kepada seluruh personil BBPP Binnuang serta pihak-pihak yang berkepentingan.

c) Lembaga Pelatihan Profesi

Sejak tahun 2013 BBPP Binnuang mendapat mandat dari LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) Pemerintah, yaitu Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian untuk menyelenggarakan pelatihan Profesi baik bagi jabatan fungsional Penyuluh Pertanian maupun non ASN. Pelaksanaan Sertifikasi yang sudah dilakukan sejak tahun 2013 antara lain : Pelatihan Kompetensi/Profesi yang berkaitan dengan Vokasi Produksi Benih Tanaman Padi, Vokasi Produksi Benih Tanaman Perkebunan, Vokasi Alsintan, Vokasi Mandor Kebun Kelapa Sawit, Vokasi Fasilitator Pertanian Organik dan lain-lain.



d) Tempat Uji Kompetensi (TUK)

Sebagai Lembaga Pelatihan Profesi BBPP Binnuang telah dapat penugasan untuk melaksanakan mandat Uji Kompetensi khusus bagi pejabat RIHP Penyuluhan Pertanian (Pertanian), yang dilaksanakan mulai tahun 2013 sampai sekarang.

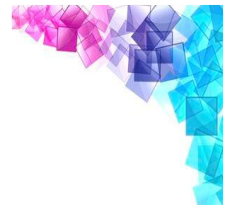
e) Penumbuhan dan pembinaan Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S)

Tujuannya adalah pemberian pelayanan sekaligus penyediaan tempat pelatihan/magang pertanian bagi pelaku utama (non apartur) yang tidak mungkin diberikan pelayanan pelatihan/magang secara langsung di BBPP Binnuang, yang tersebar di perdesaan wilayah kerja BBPP Binnuang, dan sejak tahun 2006 BBPP Binnuang sampai saat sekarang telah membina dan mengklasifikasi sebanyak 158 unit Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) yang tersebar di wilayah kerja 5 (lima) Provinsi se- Kalimantan, dengan klasifikasi masing-masingnya sbb:

Tabel 1. Sebaran, Jumlah dan Klasifikasi P4S Tahun 2024

No	Provinsi	Utama	Madya	Pemula	Jumlah
1	Kalimantan Selatan	0	8	29	37
2	Kalimantan Tengah	2	9	29	40
3	Kalimantan Timur	0	21	17	38
4	Kalimantan Barat	4	5	18	27
5	Kalimantan Utara	0	8	8	16
Total		6	51	101	158

Di Triwulan I Tahun 2024 terdapat penetapan penerima program bantuan penguatan kelembagaan P4S berupa sarana dan prasarana dengan target 8 lembaga dalam rangka penguatan Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) sebagai pusat pembelajaran petani dan untuk menunjang tugas dan fungsi P4S maka dipandang perlu untuk pemenuhan sarana dan prasarana bagi P4S. Penerima program bantuan penguatan kelembagaan P4S direncanakan berupa proyektor, kursi kuliah, speaker wearless, meja rapat, dan lemari buku dll.



f) Inkubator Agribisnis sebagai Unit Pembelajaran Usaha

Inkubator Agribisnis merupakan bentuk lembaga yang dibentuk dan memiliki fungsi pembinaan, pendampingan, dan pengembangan kewirausahaan stakeholders. Peranan inkubator bisnis sangat strategis sebagai unit yang fokus dalam meningkatkan atmosfer kewirausahaan di lingkungan stakeholders pertanian.

BBPP Binuang memiliki Inkubator Agribisnis (IA) BBPP Binuang, di mana tujuan pengembangan pusat inkubator agribisnis adalah:

- a. Menginkubasi para tenant sehingga mampu : (1). Menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan; (2). Menerapkan pola manajemen usaha agribisnis; (3). Menerapkan kaidah kaidah bisnis dalam meningkatkan skala usaha dan pendapatan.
- b. Membantu mempercepat tumbuhnya pelaku usaha agribisnis yang andal dan mandiri.
- c. Membuka peluang lapangan kerja di bidang agribisnis sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat.

IA BBPP Binuang sebagai wadah dalam bentuk divisi guna proses penyehatan (inkubasi) dan konsultasi bagi tenant sehingga menjadi pelaku usaha agribisnis yang mandiri dan andal berdasarkan kaidah bisnis yang bertanggung jawab dengan membangun budaya bisnis dan kebersamaan yang kuat, dalam mengelola sumberdaya secara optimal.

g) Sumberdaya Manusia

BBPP Binuang didukung oleh 40 karyawan, dengan berstatus Pegawai Negeri Sipil sebanyak 40 orang aparat serta 2 orang aparat berstatus PPPK (data per 31 Maret 2024), yang terdiri atas 27 Aparat laki-laki dan 15 Perempuan. Selain itu didukung 21 Tenaga Harian Lepas (THL) dengan kontrak kerja per tahun.

h) Sumberdaya Teknologi

BBPP Binuang memiliki ketersediaan alat mesin pertanian yang cukup memadai, mulai dari peralatan pra panen, pengolahan lahan, budidaya tanaman, panen, Pasca Panen, dan sampai kepada pengolahan hasil pertanian, sehingga BBPP Binuang mampu melaksanakan pelatihan pertanian dari hulu sampai hilir.



Disamping itu, sarana prasarana yang dimiliki berupa bengkel alsintan dengan petugas teknisi alsintan untuk mengembangkan berbagai alat dan mesin yang tersedia, dapat memberikan peluang pengembangan kreatifitas pertanian, baik melalui modifikasi peralatan yang telah ada, maupun merancang peralatan baru yang tepat guna dan dibutuhkan oleh petani dengan biaya murah. Pengolahan Limbah Pertanian dan pembuatan pupuk kompos dan cair dari Kotoran ternak itik.

Pendukung fasilitas lainnya, juga diperkuat dengan tersedianya Perpustakaan dan fasilitas Informasi Teknologi melalui Web Site BBPP Binuang, perpustakaan on line, yang ditunjang dengan jaringan Wifi 24 jam.

c. Sarana Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 dimanfaatkan sebagai fasilitas dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Balai, meliputi: gedung kantor, aula utama beserta ruang kelas, *quest house*, asrama peserta, ruang makan, poliklinik, agri café mart, inkubator agribisnis, jalan kompleks, lahan praktek, saluran irigasi, gedung perpustakaan, musholla, sarana olah raga, lapangan parkir, green house, unit pengolahan pupuk organik, alat dan mesin pertanian, laboratorium penyuluhan, alat pengolahan hasil pertanian, kendaraan dinas serta operasional balai, laboratorium pengolahan hasil pertanian dan lain-lain.

1) Permasalahan Utama (*strategic issued*)

Permasalahan yang dihadapi Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang untuk mengoptimalkan peran dan fungsinya sebagai lembaga pelatihan untuk peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur dan non aparatur pertanian adalah sebagai berikut :

a. Aspek Kelembagaan

- a) Sebagai UPT BBPP Binuang tidak memiliki kewenangan dalam pengembangan kelembagaan, sehingga sangat sulit untuk mengikuti pola-pola pengembangan kompetensi SDM yang menjadi tuntutan dunia kerja industri pertanian.



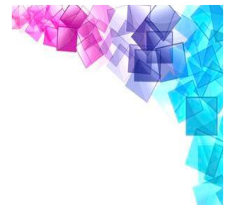
- b) Belum seluruh instalasi yang ada dapat mengakomodir kebutuhan kegiatan praktek peserta pelatihan, dalam mendukung optimalnya pelayanan penyelenggaraan pelatihan.
- c) Sebaran keberadaan P4S belum merata, sehingga ada beberapa Kabupaten di Provinsi se- Kalimantan (wilayah kerja) masih ada yang belum ada P4S nya, demikian pula dalam tingkat kemampuan pengelola P4S, masih banyak didominasi klasifikasi Pemula.
- d) Belum optimalnya penggunaan dan ketersediaan sarana prasana Pelatihan
- e) Belum optimalnya peran dan fungsi Inkubator Usahatani dalam mendukung penumbuhan usaha kecil pertanian dan pelatihan berbasis kewirausahaan pertanian
- f) Mandat LDP dan TUK masih fokus pada beberapa bidang keahlian atau vokasi, belum mengarah sepenuhnya ke kompetensi (SSKNI) RIHP lainnya.

b. Aspek Ketenagaan

- a) Terbatasnya kuantitas tenaga kepelatihan
- b) Masih kurangnya motivasi untuk pengembangan diri Tenaga fungsional khususnya widyaiswara (kajiwidya, karya tulis ilmiah, modul, jurnal, short course dll)
- c) Belum proposionalnya penempatan tenaga pelatihan berdasarkan beban kerja dan kompetensi masing-masing petugas.

c. Aspek penyelenggaraan

- a) Standar mutu pelayanan Pelatihan telah menggunakan Sistem manajemen Mutu SMM ISO 9001 : 2015, dengan menggunakan instrumen SOP sebagai acuan instruksi kerja pelayanan, tetapi dalam implementasinya belum secara optimal dilaksanakan dan terkoreksi sebagai tindak lanjut perbaikannya, sehingga belum adanya revisi SOP untuk peningkatan pelayanan penyelenggaraan pelatihan.
- b) Belum jelasnya penjenjangan pelatihan (dasar, menengah dan lanjutan), sesuai Permentan No. 49 Tahun 2011 untuk pelatihan teknis maupun kewirausahaan
- c) Belum optimalnya peran dan fungsi P4S dalam pelayanan peningkatan SDM Petani sekitar melalui penyelenggaraan permagangan/pelatihan.



d. Aspek Kerjasama

- a) Belum adanya regulasi terhadap pengelolaan biaya/anggaran kerjasama sebagai dasar pengenaan tarif kerjasama baik Pelatihan maupun kegiatan pemanfaatan fasilitas kepelatihan.
- b) Belum optimalnya pemanfaatan peluang kerjasama pelatihan dan permagangan, baik oleh pemerintah maupun oleh swasta.

e. Aspek Pembiayaan

- a) Pembiayaan belum sepenuhnya mengakoodir pelaksanaan seluruh tugas pokok dan fungsi balai.
- b) Terbatasnya pembiayaan belanja mengikat (rutin) dalam menangani kegiatan pemeliharaan dan operasional sehari-hari perkantoran.

C. Isu Strategis

Isu strategis yang saat ini berkembang dan kemungkinan besar dalam jangka waktu lima tahun ke depan akan mempengaruhi perkembangan pelaksanaan tugas BBPP Binnang dalam aspek penyelenggaraan pelatihan dan dukungannya terhadap pengembangan pembangunan pertanian yaitu: pertanian ramah lingkungan, penganekaragaman produk pertanian, dan pertanian modern adalah :

- 1. Inisiatif food estate sebagai antisipasi terhadap gangguan ketahanan pangan negara-bangsa telah dimunculkan dalam dokumen RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2020-2024. Program Food estate bahkan sudah ditetapkan sebagai Program Strategis Nasional (PSN). Dengan program food estate diharapkan didapat kecukupan produksi/swasembada melalui komoditi prioritas, yang meliputi padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, sorgum, buah-buahan, sayur-sayuran, sagu, kelapa sawit, tebu, dan ternak sapi atau ayam serta pertanian terintegrasi.
- 2. Isu perubahan iklim dapat menjadi tantangan ekonomi dalam jangka menengah panjang, sehingga menjadi perhatian utama banyak negara di dunia. Isu perubahan iklim yang mengemuka adalah meningkatnya suhu bumi sebesar 2,5 hingga 4,7 derajat Celcius di tahun 2100 akibat peningkatan Gas Rumah Kaca (GRK). Salah satu upaya untuk mengantisipasi hal ini adalah melalui Perjanjian Perjanjian Paris oleh 196 negara. Perjanjian ini merupakan bentuk komitmen dunia dalam memperkuat penanganan global terhadap ancaman perubahan iklim.



Dorongan positif juga berasal dari sektor-sektor usaha yang berkaitan dengan energi baru dan terbarukan (EBT). Sektor EBT juga menjadi salah satu pendorong pemulihan ekonomi nasional ke arah yang lebih baik lagi di masa depan. Untuk itu, Pemerintah telah menetapkan ekonomi hijau sebagai salah satu strategi utama transformasi ekonomi dalam jangka menengah panjang. Strategi ini juga akan membantu Indonesia dalam mewujudkan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs. Terobosan-terobosan baru sangat diperlukan untuk bisa melakukan lompatan dalam mencapai target SDGs ini, termasuk juga rekayasa teknologi di sektor pertanian.

3. Gerakan Tanam Pro Organik (Genta Organik) saat ini menjadi fokus utama BPPSDMP Kementerian Pertanian (Kementan), dalam memengaruhi tingkat produktivitas hasil pertanian di Indonesia melalui ketersediaan dan kecukupan pupuk serta mendorong para petani menggunakan pupuk organik dan hayati secara mandiri dan masif.
4. Smart Farming yang merupakan metode dalam upaya memajukan bisnis pertanian inovatif Berbasis Internet of Things (IoT). Dengan konsep smart farming ini memudahkan pelaku pertanian dalam mengecek suhu, fertilizer, pengairan dan pemupukan. Dalam upaya mencapai hal tersebut juga perlu diadakan sebuah kolaborasi antara teknologi dan SDM pertanian yang mampu memanfaatkan *artificial intelligence* (teknologi mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia).
5. Sistem pertanian terpadu merupakan sistem integrasi pertanian yang menggabungkan beberapa sektor, seperti pertanian, peternakan dan sektor lain (perkebunan, perikanan, dan kehutanan) sebagai solusi untuk meningkatkan produktivitas lahan dan konservasi lingkungan serta meningkatkan penghasil rumah tangga pelaku pertanian.
6. Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi di Balai Besar Pelatihan Pertanian belum dapat memenuhi kompetensi yang diperlukan oleh petugas fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian untuk melaksanakan tugasnya dalam upaya meningkatkan kemampuan produksi para petani dan pelaku usaha agribisnis.



7. Pelatihan yang diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang belum sepenuhnya dapat meningkatkan kompetensi peserta untuk melakukan praktek karena terbatasnya prasarana dan sarana pelatihan.
8. Sertifikat yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian dalam bentuk Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan bagi aparatur atau Sertifikat Telah Mengikuti Pelatihan bagi non aparatur belum dapat dijadikan sebagai jaminan bagi aparatur maupun non aparatur yang berlatih untuk dapat bersaing dalam dunia kerja khususnya di kawasan Asia Tenggara.
9. Pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM Pertanian aparatur maupun non aparatur dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dengan pelatihan vokasi pertanian, meliputi vokasi fasilitator pertanian organik, vokasi penangkar benih, vokasi sayuran organik dan vokasi yang lain yang mendukung keterampilan petani dalam mengelola usahatannya.

Berdasarkan Isu strategis tersebut di atas, pelatihan yang diselenggarakan di BBPP Binuang Triwulan I Tahun 2024 akan lebih banyak diarahkan pada pelatihan Sistem pertanian terpadu, Gerakan Tanam Pro Organik (Genta Organik) serta Smart Farming dan pelatihan lain yang mendukung komoditas strategis serta memiliki nilai ekonomi tinggi. Pelatihan seperti ini harus terintegrasi dengan praktek agribisnis yang dilaksanakan di BBPP Binuang secara berkesinambungan baik yang menghasilkan produk segar maupun hasil olahan. Prasarana dan sarana pelatihan yang diperlukan untuk kegiatan sistem pertanian terpadu haruslah ditingkatkan jumlah dan mutunya.

Dalam perancangan pelatihan penetapan Standar Kompetensi Kerja (SKK) akan menjadi hal yang sangat penting karena berkaitan dengan penyusunan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan para pengguna jasa pelatihan baik aparatur maupun non aparatur. SKK harus disusun oleh BBPP dengan melibatkan instansi asal peserta aparatur atau instansi Pembina peserta non aparatur dan pemangku kepentingan lainnya.

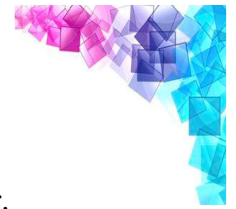
Dalam rangka peningkatan daya saing purnawidya pelatihan diperlukan SDM Pertanian kepelatihan yang kompeten. Widyaiswara sebagai motor penggerak dalam proses pelatihan serta tenaga kepelatihan balai haruslah terlatih dan tersertifikasi sesuai spesialisasinya. Tenaga kepelatihan yang sangat menentukan



mutu penyelenggaraan pelatihan perlu ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan sesuai standar *Management of Training* (MOT) maupun *Training Officer Course* (TOC).

Dalam penyelenggaraan organisasi Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang terdapat lingkungan strategis yang terdiri dari lingkungan strategis internal dan eksternal, baik yang bersifat positif maupun negatif.

1. Dalam konteks organisasi lingkungan internal positif yaitu kekuatan (*strengths*) yang dimiliki oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang dalam pelaksanaan pengembangan SDM Pertanian yaitu :
 - a. BBPP Binuang terletak pada lokasi strategis di tepi jalan trans Kalimantan yang menghubungkan Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.
 - b. BBPP Binuang memiliki sarana pelatihan berupa empat unit asrama full-AC dengan kapasitas tampung 120 orang, serta tiga ruang kelas belajar dan satu aula (full-AC).
 - c. BBPP Binuang menyelenggarakan pelatihan dengan metode pendekatan Experiential Learning Cycle (ELC) atau AKOSA (Alami, Kemukakan, Olah, Simpulkan, Aplikasikan) dengan pendekatan pembelajaran orang dewasa/ Andragogy yang bersifat pembaharuan.
 - d. Tersedianya pedoman dan petunjuk pelaksanaan di dalam penyelenggaraan pelatihan dalam bentuk peraturan Menteri Pertanian dan peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.
 - e. Sistem manajemen BBPP Binuang telah tertata dengan adanya *Standard Operating Procedures* (SOP).
 - f. Widyaiswara yang ada di BBPP Binuang telah mengikuti pelatihan metodologi pelatihan dan pelatihan teknis sesuai spesialisasinya.
 - g. Sejak tahun 2012 BBPP Binuang telah memiliki sertifikat manajemen mutu ISO 9001 : 2008. Tahun 2024 ini BBPP Binuang telah memiliki sertifikat manajemen mutu ISO 9001 : 2015 sudah diperbaharui.
2. Adapun lingkungan internal organisasi yang negatif yaitu kelemahan (*weaknesses*) dalam pelaksanaan kegiatan saat ini meliputi :
 - a. Sarana praktek untuk kegiatan pelatihan belum lengkap dan memadai.



- b. Kompetensi pejabat struktural dan staf pelaksana belum sesuai standar.
 - c. Jumlah Widyaiswara belum memenuhi standar kebutuhan dan distribusi spesialisasinya tidak merata.
 - d. Kompetensi Widyaiswara belum tersertifikasi.
 - e. Kurikulum dan metodologi pelatihan belum mantap.
 - f. SOP belum diimplementasikan dengan baik.
 - g. Perubahan atau revisi SOP tidak dilaksanakan walaupun nomenklatur kinerja sudah berubah.
 - h. Budaya Kerja (Komitmen, Keteladanan, Profesionalisme, Integritas dan Disiplin) belum sepenuhnya diterapkan oleh pejabat dan staf pelaksana.
 - i. Pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa pelatihan belum prima.
3. Kemudian lingkungan strategis eksternal organisasi yang positif yaitu peluang (*opportunities*) dalam kegiatan yaitu:
 - a. Hubungan koordinasi yang baik dengan instansi lingkup pertanian di wilayah kerja BBPP Binnang.
 - b. Kepercayaan pengguna jasa pelatihan terhadap kompetensi BBPP Binnang dalam melaksanakan pelatihan.
 - c. Tersedianya dana pemerintah kabupaten dan provinsi di wilayah kerja untuk pelaksanaan kerjasama pelatihan dengan BBPP Binnang.
 - d. Terdapat Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) di wilayah kerja BBPP Binnang yang memiliki kemampuan yang baik untuk bekerjasama dalam pelaksanaan pelatihan non aparatur.
 4. Sedangkan lingkungan strategis eksternal organisasi yang negatif yaitu tantangan (*threats*) dalam pelaksanaan kegiatan yaitu :
 - a. Besarnya biaya transportasi peserta khususnya yang berasal dari luar wilayah Kalimantan Selatan untuk menghadiri pelatihan di BBPP Binnang.
 - b. Tuntutan kebutuhan pengguna jasa pelatihan aparatur dan non aparatur pertanian yang semakin tinggi terhadap mutu pelatihan.
 - c. Sulitnya memperoleh tambahan tenaga kepelatihan khususnya Widyaiswara yang berkualitas tinggi, baik melalui detasering pegawai maupun rekrutmen tenaga baru.



BBPP Binuang sebagai lembaga Pelatihan, untuk menghasilkan SDM pertanian yang kompeten dan berkarakter, maka perlunya standarisasi lembaga, sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 2/Permentan/SM.300/J/01/12 tanggal 9 Januari 2012, yang pada gilirannya mampu bersaing dengan lembaga pelatihan tenaga kerja swasta dan dikenal di tingkat internasional. Dan agar para penyelenggaranya (Widyaiswara dan tenaga kepelatihan lainnya) menjadi pengelola pelatihan yang berdaya saing dan bertaraf internasional, maka dibutuhkan Widyaiswara yang berkualitas sesuai dengan kompetensi dan spesialisasinya.

Sesuai dengan Peraturan Kepala LAN Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Widyaiswara, kompetensi yang harus dimiliki oleh Widyaiswara meliputi: (i) kompetensi pengelolaan pembelajaran; (ii) kompetensi kepribadian; (iii) kompetensi sosial; dan (iv) kompetensi substantive.

Sedangkan penetapan spesialisasi Widyaiswara mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Standardisasi Tenaga Kepelatihan Pertanian Nomor 08/Permentan/OT.140/J/12/11, dengan kekhasan pertanian diwajibkan memiliki 8 jenis spesialisasi yaitu : (i) Budidaya Tanaman; (ii) Pengelolaan Limbah Tanaman; (iii) Hama dan Penyakit Tanaman; (iv) Konservasi Lahan dan Klimatologi; (v) Mekanisasi Pertanian; (vi) Pasca Panen dan Teknologi Hasil Pertanian; (vii) Sosial Ekonomi Pertanian; dan (viii) Penyuluhan Pertanian. Sampai saat ini Widyaiswara dan tenaga kepelatihan yang ada di BBPP Binuang sepenuhnya belum didukung oleh Widyaiswara dengan spesialisasi yang diperlukan.

Isu Otonomi Daerah masih perlu menjadi pertimbangan, bahwa otonomi daerah adalah otoritas yang dimiliki daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam menetapkan kebijakan dan arah pembangunan didaerahnya berdasarkan potensi yang dimilikinya untuk sebesar-besarnya kepentingan kesejahteraan rakyatnya, demikian pula terhadap pembangunan sector pertanian, bahwa hampir setiap Kabupaten/kota memiliki program sendiri dalam rencana pembangunannya.

Tugas kita adalah mensinkronkan (linkage) program antara program pembangunan pertanian nasional dengan program yang diusung oleh masing-masing daerah, baik provinsi maupun kabupaten/Kota, melalui kegiatan penyelenggaraan pelatihan fokus wilayah berbasis program pembangunan pusat dan daerah.



D. Dukungan Anggaran

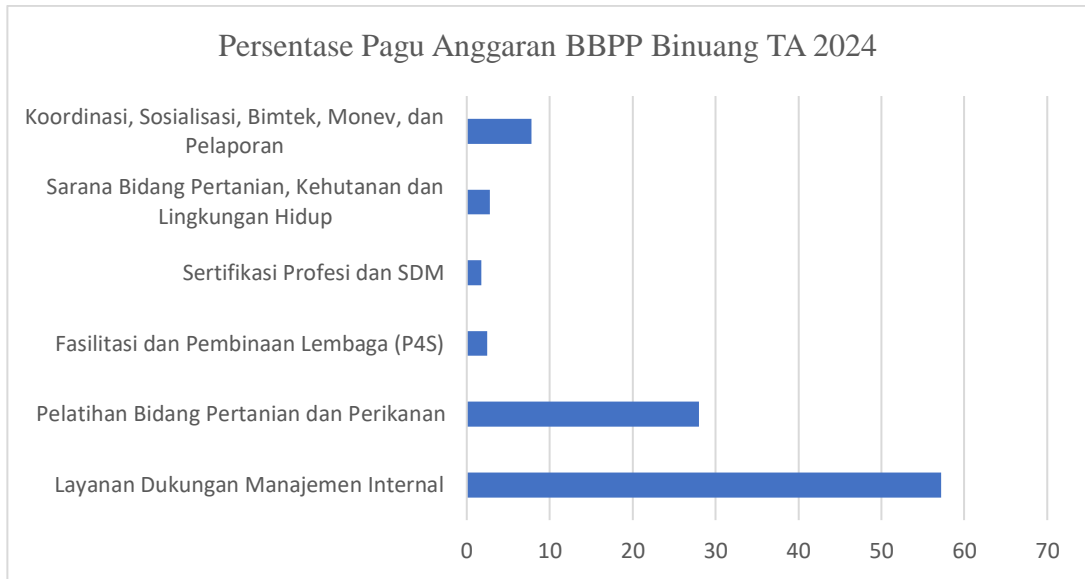
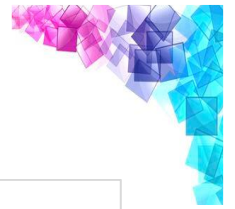
Untuk mendukung misi, tugas dan fungsi Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang, anggaran yang terdapat pada revisi pagu APBN BBPP Binuang Tahun 2024 adalah sebesar Rp 11.224.419.000 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. Anggaran BBPP Binuang Triwulan I Tahun 2024

No	Uraian	PAGU (dalam Rupiah)	Persentase
1	AEA - Koordinasi Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan	875.000.000	7,80
2	CAG - Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup Sarana Pelatihan Pertanian	315.550.000	2,81
3	PDI - Sertifikasi Profesi dan SDM Sertifikasi Profesi dan SDM	198.000.000	1,76
4	QDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Penumbuhan dan Penguatan P4S	276.585.000	2,46
5	SCC - Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan - Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Aparatur - Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur	3.141.200.000	27,99
6	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan Perkantoran	6.418.084.000	57,18
	Total	11.224.419.000	100 %

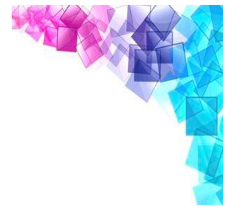
Tabel 2 menunjukkan bahwa persentase pagu anggaran BBPP Binuang adalah pada kegiatan Layanan Perkantoran UPT Pelatihan yaitu Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan 7,80 %, Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 2,81 %, Sertifikasi Profesi dan SDM 1,76 % Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 2,46 %, Bidang Pertanian dan Perikanan 27,99 %, Layanan Dukungan Manajemen Internal 57,18 %.

Persentase pagu anggaran BBPP Binuang Triwulan I Tahun 2024 pada Gambar 4.



Gambar 4. Persentase Pagu Anggaran BBPP Binnuang

Pada Triwulan I Tahun 2024 berjalan total pagu anggaran sebesar Rp 11.224.419.000.



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis BBPP Binuang tahun 2020–2024 disusun dengan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan strategis tahun 2020–2024, program kegiatan dan rencana aksi pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Visi

Dalam rangka mengembangkan tugas pokok yaitu melaksanakan dan mengembangkan teknik, pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian, BBPP Binuang menetapkan visi 2020 - 2024 dengan mengacu kepada visi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, maka visi Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang (BBPP) adalah: *“Menjadi Center of Excellence dalam menyelenggarakan pelatihan untuk menghasilkan SDM pertanian yang profesional, inovatif, mandiri dan berdaya saing” mendukung Job Creator dan Job Seeker”*.

2. Misi

Untuk dapat menjadi Center of Excellence dalam menyelenggarakan pelatihan untuk menghasilkan SDM pertanian yang profesional, inovatif, mandiri dan berdaya saing maka BBPP Binuang menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pelatihan.
- b. Mengembangkan ketenagaan diklat.
- c. Mengembangkan manajemen mutu penyelenggaraan diklat.
- d. Mengembangkan program dan jejaring kerjasama pelatihan pertanian dalam dan luar negeri.
- e. Menyiapkan pelatihan berbasis Job Ceator dan Job Seeker.

3. Tujuan

Sejalan dengan tujuan Badan PPSDMP tujuan yang dicapai oleh BBPP Binuang adalah:

- a. Meningkatkan kapasitas Kelembagaan Pelatihan Pertanian mendukung penumbuhan dan pengembangan wirausaha muda pertanian;
- b. Meningkatkan kapasitas Kelembagaan Pelatihan Pertanian mendukung penumbuhan dan pengembangan penyiapan pencari kerja sektor pertanian;



- c. Menguatkan kapasitas Kelembagaan Pelatihan Pertanian mendukung Peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN dan pekerja bidang pertanian lainnya untuk meningkatkan produksi dan daya saing pertanian
- d. Menguatkan kapasitas Kelembagaan Pelatihan Pertanian mendukung Penguatan dan Pengembangan Penyuluhan/Pedampingan Petani dan Korperasi Petani

4. Sasaran Strategis

Dalam mengembangkan kompetensi sumberdaya manusia aparatur dan non aparatur pertanian, BBPP Binnang pada tahun 2020–2024 akan melakukan 4 (empat) kegiatan utama yang terdiri dari:

1. Meningkatkan kapasitas Kelembagaan Pelatihan Pertanian

- a) Terwujudnya kelembagaan BBPP Binnang yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional;
- b) Terwujudnya 20 unit Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) sebagai lembaga pelatihan yang mandiri dalam berusahatani dan mampu menyelenggarakan pelatihan/ permagangan berbasis IPTEK Internasional.
- c) Terwujudnya pendampingan pembentukan Kelompok Usaha Bersama;
- d) Terwujudnya inkubator Usahatani di BBPP Binnang.

2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas Peningkatan Ketenagaan kediklatan yang profesional dan berkarakter

- a) Meningkatkan kompetensi 13 orang (kumulatif) Widyaiswara BBPP Binnang sesuai spesialisasi utamanya dalam mendukung program prioritas dan pengembangan kawasan pertanian;
- b) Sedangkan 2 orang Widyaiswara sedang melakukan tugas belajar Strata 3 /doktoral yang diharapkan mampu meningkatkan kinerja pelatihan;
- c) Meningkatnya profesionalisme 50 orang tenaga kediklatan pada BBPP Binnang;
- e) Meningkatnya kompetensi petani, PPL, penyuluh swadaya, serta stakeholder pertanian lain menjadi wirausahawan yang mampu bersaing di pasar nasional dan internasional melalui penguasaan IPTEK.

3. Berkembangnya Jejaring Kerjasama Diklat Dalam dan Luar Negeri

- a) Meningkatnya promosi, publikasi, dan sosialisasi kelembagaan pelatihan melalui berbagai media informasi seperti pameran, profil, media cetak, elektronik, diorama, display, dan lain-lain;



- b) Meningkatnya jejaring kerjasama diklat dan/atau permagangan dalam dan luar negeri serta sumber pembiayaannya;
- c) Meningkatnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kerjasama diklat dan permagangan pertanian dalam dan luar Negeri dengan pihak terkait.

5. Kebijakan Strategis Tahun 2020-2024

A. Arah Kebijakan

Arah kebijakan umum Badan PPSDMP dalam pengembangan sumberdaya manusia pertanian, adalah:

1. Penguatan pendidikan vokasi pertanian untuk menghasilkan Job Creator dan Job Seeker.
2. Penguatan Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi Profesi pertanian untuk menghasilkan *Job Creator* dan *Job Seeker*
3. Penguatan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian
4. Penguatan system manajemen peningkatan kompetensi ASN dan Pekerja bidang pertanian untuk meningkatkan produksi dan daya saing pertanian.

Sejalan dengan arah kebijakan Badan PPSDM Pertanian terkait dengan kegiatan Pelatihan Pertanian pada Balai Besar Pelatihan Pertanian difokuskan pada ***Peningkatan Daya Saing dan Kinerja Pelatihan untuk Mendukung menghasilkan Job Creator dan Job Seeker***, yaitu:

1. Membangun eksistensi dan kemandirian lembaga melalui program berorientasi pasar, pengembangan agribisnis dan optimalisasi sarana prasarana bagi berbagai kegiatan produktif dan bernilai tinggi;
2. Pengembangan Kelembagaan dan Sarana-Prasarana UPT Pelatihan Menuju Badan Layanan Usaha (BLU);
3. Peningkatan kompetensi Widyaiswara dan tenaga kediklatan lainnya diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi yang profesional dan berkarakter;
4. Diklat Berbasis Standar Kompetensi Kerja yang berdaya saing;
5. Pengembangan model dan pola diklat yang berorientasi pasar, bio-industri berkelanjutan, berbasis kawasan, diklat di tempat kerja, berbasis kreatifitas, dan lain-lain;
6. Fasilitasi P4S sebagai lembaga diklat swadaya;



7. Pengembangan Jejaring Kerjasama dan Kemitraan dalam dan luar negeri yang saling menguntungkan.

B. Strategi

Strategi kebijakan pelatihan pertanian adalah meningkatkan Daya Saing dan Kinerja Balai Pelatihan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Standarisasi mutu layanan kediklatan;
2. Peningkatan prasarana dan sarana UPT pelatihan pertanian.
3. Pemberdayaan P4S sebagai penyelenggara diklat non-aparatur dan TUK.
4. Peningkatan kapasitas Widyaiswara dan Tenaga Kediklatan;
5. Pemantapan sistem pelatihan pertanian berbasis kompetensi dan daya saing;
6. Pengembangan program dan jejaring kerjasama pelatihan.

6. Program Kegiatan

Program Badan PPSDMP Pertanian adalah Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan, dan Pelatihan Pertanian, yang dijabarkan pada Kegiatan Pusat Pelatihan Pertanian yaitu Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian. Dalam mengimplementasikan Program tersebut Puslatan merumuskan kegiatan dan indikator kedalam 4 (empat) pilar yaitu : (i) Peningkatan penyelenggaraan pelatihan pertanian; (ii) Kelembagaan pelatihan pertanian; (iii) Peningkatan ketenagaan pelatihan pertanian; (iv) Pengembangan program dan jejaring kerjasama pelatihan. Balai Besar Pelatihan Pertanian sebagai UPT Pelatihan Pusat mempunyai program yang sama dengan Puslatan untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi eselon I .

IKU Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang sebagaimana yang tertuang pada IKU Pusat Pelatihan Pertanian yaitu:

- a. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK).
- b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik.

7. Program dan Kegiatan Tahun 2024

Program Tahun 2024 adalah peningkatan penyuluhan dan pelatihan pertanian dengan kegiatan utama yang mendukung program tersebut adalah :

- a. Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Aparatur
- b. Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur
- c. Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian
- d. Fasilitas dan Pembinaan Lembaga



- e. Layanan Dukungan Manajemen Internal, termasuk dukungan teknis lainnya seperti penyelenggaraan kebun praktek.

B. Perjanjian Kinerja

Perencanaan Kinerja dituangkan kedalam Dokumen Penetapan Kinerja. Dokumen penetapan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Kepala Badan PPSDMP dan Kepala BBPP Binuang untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan Kinerja disusun setelah DIPA ditertibkan, dan dijadikan lampiran dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja yang ditetapkan dengan rincian perjanjian sebagai berikut:

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Selanjutnya disebut pihak pertama dengan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua melakukan PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.

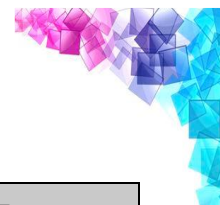
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian tersebut (Tabel 3), dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

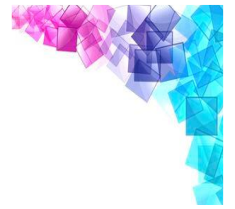
Unit Eselon I : Badan PPSDMP
Unit Eselon IIb : BBPP Binuang
Tahun Anggaran : 2024

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Tahun 2024

Sasaran strategis	Indikator Kinerja Outcome	Target
1	2	3
(A) Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pertanian melalui pelatihan vokasi pertanian	Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya	85 %



Sasaran strategis	Indikator Kinerja Outcome	Target
1	2	3
(B) Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian	Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian	3,93
(C) Terwujudnya Birokrasi BBPP Binuang yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	34,00
(D) Meningkatnya tata kelola anggaran BBPP Binuang	Nilai Kinerja Anggaran BBPP Binuang	90,80



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban Balai Besar Pelatihan Pertanian Binnang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan selama Triwulan I Tahun 2024. Sebagai bahan evaluasi kinerja juga dibandingkan dengan kinerja lima tahun sebelumnya serta kinerja yang diharapkan pada rencana strategis yang telah disusun yaitu tahun 2021 - 2024.

A. Kriteria Ukuran Keberhasilan

Gambaran kinerja BBPP Binnang dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 tersebut digunakan metode *scoring* yang mengelompokkan capaian kedalam 4 (empat) kategori kinerja, yaitu : (1) sangat berhasil (capaian > 100%), (2) berhasil (capaian 80-100), (3) cukup berhasil (capaian 60-80%) dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja yang diukur dibedakan atas 2 (dua) jenis indikator, yaitu *lead indicator* dan *lag indicator*. *Lead Indicator* adalah indikator yang pencapaiannya dibawah kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator proses atau indikator aktivitas. Sedangkan *lag indicator* adalah indikator yang pencapaiannya diluar kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator *output* atau indikator *outcome*. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) eselon II menggunakan jenis indikator *output*. Sehingga Perjanjian Kinerja (PK) eselon II menggunakan *Lag Indicator*.

B. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja kegiatan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.



Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektifitas.

Capaian kinerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Triwulan I Tahun 2024 diuraikan masing-masing tiap sasaran strategis dan indikator kinerja meliputi: Hasil Pengukuran Kinerja Triwulan I Tahun 2024, Analisis Nilai Kinerja Anggaran dan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja beserta capaian kinerja lainnya. Berikut disampaikan uraian capaian kinerja.

Hasil Pengukuran Kinerja Triwulan I Tahun 2024

Unit Eselon I : Badan PPSDMP
Unit Eselon IIb : BBPP Binuang
Tahun Anggaran : 2024

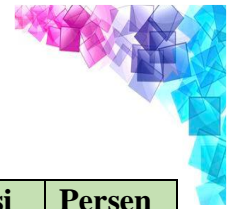
(A) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian nasional

Indikator Keberhasilan : Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya (IKSK)

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*) (Permendagri No. 86/2017). Sedangkan indikator kinerja sasaran kegiatan adalah indikator keluaran (*output*) yang mencerminkan kinerja capaian dari pelaksanaan kegiatan pada BBPP Binuang.

Tabel 4. Capaian Rincian Output (RO) Pelatihan Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahunan		Realisasi	Persen
	2024	Satuan	Triwulan I 2024	
Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Aparatur	120	orang	60	100 %
Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur	1580	orang	1200	75,95 %
- Bimbingan Teknis Bagi Petani dan Penyuluh Mendukung Peningkatan Produktivitas Padi dan Jagung Pelatihan Subsistem Budidaya / Usahatani	1200	orang	1200	100 %



Indikator Kinerja	Target Tahunan		Realisasi	Persen
	2024	Satuan	Triwulan I 2024	
- Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur (MP Food Estate)	360	orang	-	0 %
Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian	60	orang	-	0 %
Fasilitas dan Pembinaan Lembaga (Penumbuhan dan Penguatan P4S)	8	lembaga	-	0 %

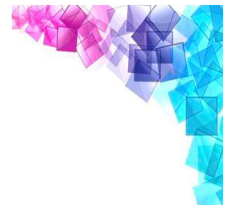
Berdasarkan Tabel 4 dalam indikator kinerja pengertian aparatur merupakan perangkat alat (negara, pemerintah), para pegawai negeri. Aparatur pemerintah merupakan alat kelengkapan negara terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari. Peserta pelatihan aparatur tersebut merupakan Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK). Sepanjang Triwulan I Tahun 2024, telah dilakukan pelatihan bagi aparatur sebanyak 60 dari target 120 orang (50 %).

Sedangkan pelatihan non aparatur adalah proses penyelenggaraan kegiatan untuk meningkatkan serta mengembangkan kompetensi profesi, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian di bidang pertanian. Peserta pelatihan non aparatur tidak berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti petani, penyuluh swadaya, serta profesi lain di sektor pertanian yang bukan ASN). Sepanjang Triwulan I Tahun 2024, telah dilakukan pelatihan bagi non aparatur dalam bentuk Bimbingan Teknis Bagi Petani dan Penyuluh Mendukung Peningkatan Produktivitas Padi dan Jagung Pelatihan Subsystem Budidaya / Usahatani sebanyak 1.200 dari target 1.200 orang (100 %).

Dalam pelatihan tersebut digunakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai bentuk penerapatan purnawidya setelah selesai pelatihan dengan mengirimkan eviden berupa foto kegiatan pertanian yang berkaitan dengan penerapan materi pelatihan.

Rumus capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

Nilai $\{ (\sum \text{SDM Pertanian yang menerapkan materi pelatihan}) : (\sum \text{Total SDM yang mengikuti pelatihan pertanian, dengan dana DIPA}) \times 100\% \}$



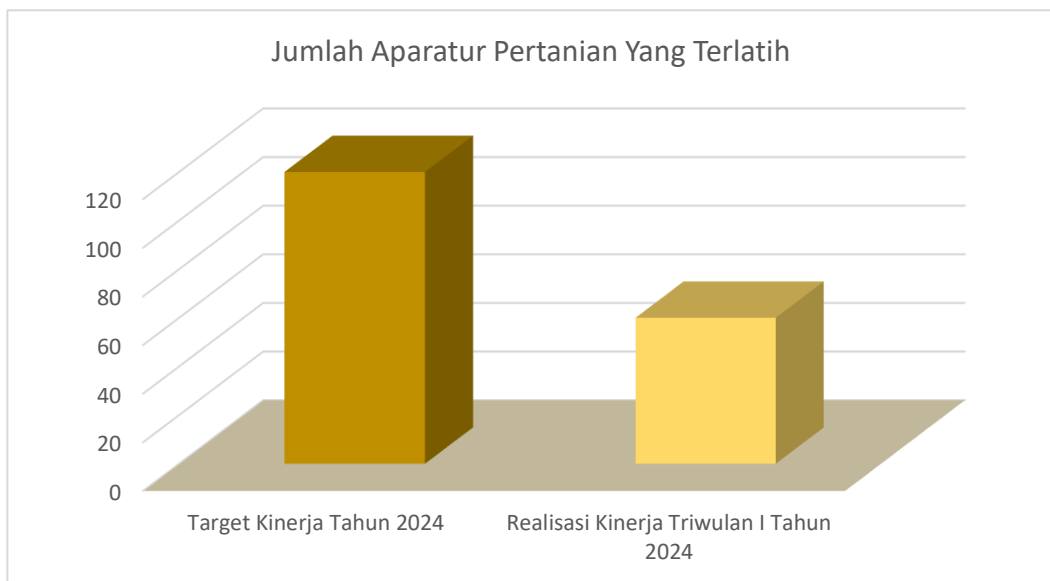
Persentase SDM pertanian yang menerapkan :

$$\frac{28 \times 100}{30} = 93,33 \%$$

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) BBPP Binnang, Kalimantan Selatan Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan sistem aplikasi elektronik Penilaian Indikator Kinerja (e-PIK) sebesar 93,33 % dari target 85 %.

a. Jumlah pelatihan vokasi pertanian bagi aparatur

Target kinerja BBPP Binnang Triwulan I Tahun 2024 untuk indikator kinerja jumlah aparatur pertanian yang terlatih adalah 60 orang dengan rincian target 120 orang. Untuk Triwulan I Tahun 2024 realisasi capaian indikator kinerja jumlah aparatur tahun sebesar 60 orang (50 %). Perbandingan realisasi kinerja BBPP Binnang Triwulan I Tahun 2024 untuk indikator jumlah aparatur pertanian yang terlatih :



Gambar 5. Jumlah Aparatur Pertanian Yang Terlatih

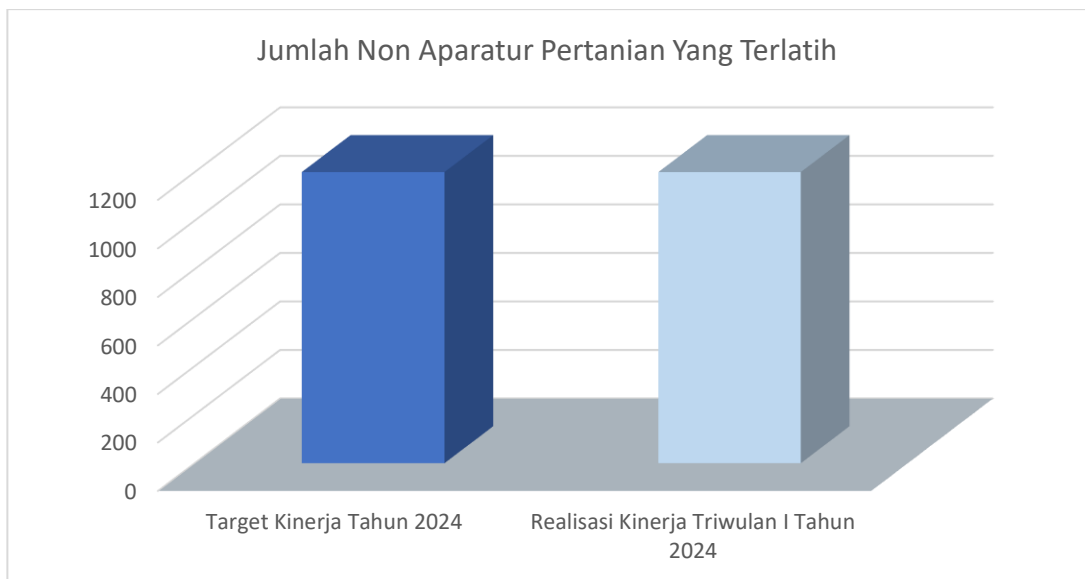
Gambar 5 di atas menunjukkan Realisasi yang telah tercapai dan target kinerja BBPP Binnang 2024. Persentase jumlah aparatur pelatihan yang telah dilatih sebesar 100 % sampai dengan akhir periode Triwulan I Tahun 2024.

b. Pelatihan Pertanian Bagi Non Aparatur

Target kinerja BBPP Binnang Triwulan I Tahun 2024 untuk indikator kinerja jumlah non aparatur pertanian yang terlatih adalah 1.580 orang, di mana 1.200 orang



peserta pelatihan dalam bentuk Bimbingan Teknis Bagi Petani dan Penyuluh Mendukung Peningkatan Produktivitas Padi dan Jagung Pelatihan Subsistem Budidaya / Usahatani, dengan realisasi sebesar 1.200 orang. Perbandingan realisasi kinerja BBPP Binuang Triwulan I Tahun 2024 untuk indikator jumlah non aparatur pertanian yang terlatih :



Gambar 6. Jumlah Non Aparatur Pertanian Yang Terlatih

Gambar 6 menunjukkan Realisasi yang telah tercapai dan target kinerja BBPP Binuang Triwulan I Tahun 2024. Persentase jumlah non aparatur pelatihan yang telah dilatih sebesar 100 %.

Sedangkan Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur (MP Food Estate) sebanyak 360 masih dalam tahap perencanaan.

c. Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian

Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang menyelenggarakan sertifikasi kompetensi tenaga kerja sektor pertanian yang independen, profesional dan objektif pada profesi pertanian sebanyak 60 orang, yang masih dalam tahap perencanaan. Kegiatan sertifikasi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, sehingga para lulusan pelatihan akan dapat langsung terserap dengan baik.

d. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Pertanian

BBPP Binuang dalam mendukung program penumbuhan 2,5 juta pengusaha petani milenial terus melakukan pembinaan dan penumbuhkembangan Pusat



Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) di wilayah kerjanya di Kalimantan. P4S sebagai pusat pembelajaran bagi petani harus mampu terus menerus berkreaitivitas untuk peningkatan kuantitas dan kualitas produk pertanian dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi.

Realisasi capaian indikator peningkatan kapasitas kelembagaan pelatihan pertanian BBPP Binnang mewakili BPPSDMP Kementerian Pertanian menyerahkan bantuan Sarpras dan P4S. Sedangkan untuk bantuan kelembagaan sedang dalam tahap perencanaan yang mencapai 8 lembaga, dengan hibah berupa laptop, proyektor, layar proyektor, kamera, printer, whiteboard dll untuk bantuan operasional P4S.

Selain hal tersebut di atas dalam dalam rangka studi banding dan menggali potensi P4S, dilakukan kunjungan ke P4S di Provinsi Bali dengan kegiatan sebagai berikut :

- Kunjungan ke P4S Cau Chocolates di Di Kabupaten Tabanan Bali dalam rangka menggali potensi P4S di sektor pertanian off farm.

Cau Chocolates merupakan P4S Factory & Restaurant yang mengkhususkan komoditas coklat organik beserta olahannya di mana operasional produksinya sudah terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir.

Dari sektor hulu P4S tersebut sudah menerapkan budidaya kakao secara organik. Sedang dalam hilir melakukan kegiatan prosesing memproduksi olahan coklat seperti cake and minuman coklat, serta tempat wisata untuk singgah dalam bentuk resto serta café berkonsep alami untuk menikmati hasil olahan coklat bagi rombongan wisatawan atau perguruan tinggi, serta sekolah yang melakukan studi banding.

- Kunjungan ke Kadek Organik Farm Di Kabupaten Tabanan Bali dalam rangka menggali potensi P4S di sektor pertanian organik.

Kadek Organik Farm merupakan P4S dengan inovasi sayuran dan buah buahan organik, dengan segmentasi pasar individu dan kelompok yang peduli dengan produk segar dan menyehatkan langsung dipanen dari kebun.

P4S tersebut memiliki misi untuk menginspirasi penumbuhan P4S baru di Bali, serta Pulau Jawa dan sekitarnya, dengan menerima petani milenial untuk magang saat berwisata ke Bali dan kembali ke rumah dengan semangat mengembangkan pertanian organik di lingkungan asalnya.



**(B) Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian
Indikator Keberhasilan : Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan (IKM)**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.

Untuk mengetahui sejauh mana pelayanan publik mampu memenuhi harapan masyarakat di suatu daerah maka diperlukan upaya-upaya untuk selalu memperbaiki pelayanan sehingga sesuai dengan perkembangan jaman dan harapan masyarakat pada saat ini. Salah satu bentuk evaluasi perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) wajib dilaksanakan oleh seluruh unit penyelenggara pelayanan publik sebagaimana diamatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan didukung oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PermenPan) Nomor 20 Tahun 2010



tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014 dan pelaksanaannya diatur oleh Keputusan Menteri Pendayaaunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menggunakan alat bantu berupa kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat pengguna layanan sebagai responden secara langsung, pertanyaan kuesioner meliputi 9 unsur yang mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2019 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian, yaitu :

1. Persyaratan pelayanan, yaitu ketentuan untuk mendapatkan suatu jenis pelayanan publik yang meliputi persyaratan administrasi dan teknis.
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi pelayanan publik dan penerima pelayanan publik termasuk pengaduan.
3. Waktu Penyelesaian Pelayanan, yaitu Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan publik.
4. Biaya/tarif Pelayanan, yaitu biaya atau tarif yang dikenakan.
5. Kesesuaian Produk Pelayanan, yaitu kesesuaian Produk yang dikeluarkan dengan aturan yang telah ditetapkan.
6. Kemampuan Petugas Pelayanan, yaitu tingkat keahlian petugas dalam melayani ataupun menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.
7. Perilaku Petugas dalam Pelayanan Terkait Kesopanan, yaitu sikap dan perilaku petugas secara ramah dan sopan serta menghormati dan menghargai masyarakat.
8. Kualitas Sarana dan Prasarana, Yaitu kondisi sarana dan prasarana yang baik dan layak digunakan.
9. Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Hasil survei SKM dan Nilai Rata - Rata (NRR) pada Triwulan I Tahun 2024 dengan 60 responden yang diperoleh dari 9 indikator unsur pelayanan, dengan nilai rata-rata sebagai berikut :



Tabel 5. Pengolahan Data Kuisisioner IKM BBPP Binnang

Perhitungan	Nilai Per Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Jumlah Nilai Per Unsur	236	234	236	236	238	236	236	236	236
Nilai Rata Rata Per Unsur	3.93	3.90	3.93	3.93	3.97	3.93	3.93	3.93	3.93
Nilai Rata Rata Tertimbang Per Unsur (NRR per unsur x 0.1111)	0.44	0.43	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44
IKM Unit Pelayanan (Total NRT * 25)	98,32	3,93							
Mutu Pelayanan	A	Sangat Baik							

Keterangan :

- U1 : Persyaratan
- U2 : Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur
- U3 : Waktu Penyelesaian
- U4 : Biaya/Tarif
- U5 : Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
- U6 : Kompetensi Pelaksana
- U7 : Perilaku Pelaksana
- U8 : Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
- U9 : Sarana Dan Prasarana

Dari data tersebut terlihat bahwa dengan nilai SKM 98,23 atau 3,93 skala likert, disimpulkan bahwa kategorisasi mutu pelayanan A atau kinerja unit pelayanan adalah Sangat Baik.

- Sistem, Mekanisme, dan Prosedur mendapatkan nilai terendah yaitu 3,90, dikarenakan acara pelaksanaan pelatihan kadang terlambat karena mesti mengumpulkan peserta dari berbagai tempat terlebih dahulu sampai kelas pelatihan penuh sebelum memulai acara pelatihan.
- Sedangkan unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya/Tarif mendapatkan nilai tertinggi 3,97 dari unsur layanan, dikarenakan BBPP Binnang tidak mengenakan biaya saat pelaksanaan pelatihan.
- Dengan nilai SKM 3,93 skala likert, capaian mutu pelayanan tersebut sesuai dengan target perjanjian kinerja sebesar 3,93 (100% atau Sangat Baik).



- Pada periode Triwulan I Tahun 2024 ini BBPP Binuang mampu mempertahankan kinerja pelayanan publik, sesuai dengan target perjanjian kinerja sebesar 3,93 (Capaian 100%).

(C) Reformasi Reformasi Birokrasi BBPP Binuang Yang Efektif, Efisien, Dan Berorientasi Layanan Pada Prima

Indikator Keberhasilan : Nilai Penilaian Mandiri Pelaksana Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Reformasi Birokrasi merupakan tulang punggung dan langkah awal untuk mencapai kemajuan sebuah Negara dimana Reformasi Birokrasi diperlukan untuk membangun pondasi yang diperlukan. Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek Kelembagaan (organisasi), Ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Manusia Aparatur. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, maka perlu dilakukan penlian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap Kementerian/Lembaga.

Dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019, dimana seluruh Kementerian dan Lembaga untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi dengan menjalankan 8 area perubahan, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Ketatalaksanaan, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

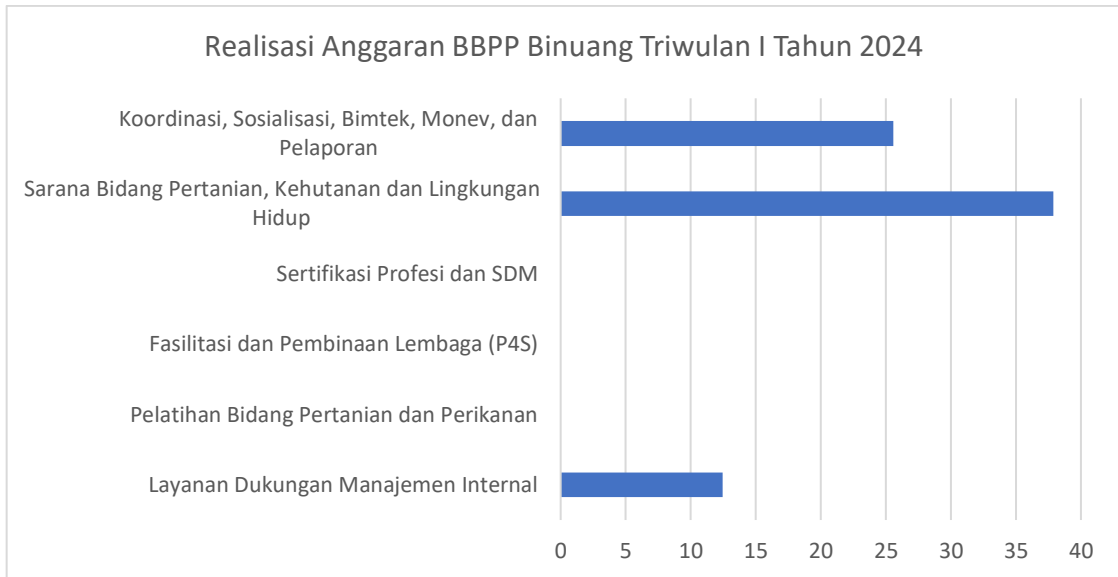
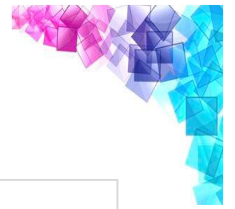
Nilai Penilaian Mandiri Pelaksana Reformasi Birokrasi (PMPRB) BBPP Binuang dilakukan secara tahunan, sehingga untuk Triwulan I Tahun 2024 realisasi capain belum dihitung.

**(D) Meningkatnya Tata Kelola Anggaran BBPP Binuang****Indikator Keberhasilan : Nilai Kinerja Anggaran****a. Realisasi Anggaran**

Tabel 6. Realisasi Anggaran BBPP Binuang Triwulan I Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	AEA - Koordinasi Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan	875.000.000	109.018.635	12,46 %
2	CAG - Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup Sarana Pelatihan Pertanian	315.550.000	-	0,00 %
3	PDI - Sertifikasi Profesi dan SDM	198.000.000	-	0,00 %
4	QDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Penumbuhan dan Penguatan P4S	276.585.000	-	0,00 %
5	SCC - Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan - Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Aparatur - Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur	2.029.906.000	768.456.550	37,86 %
6	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan Perkantoran	6.418.084.000	1.641.533.138	25,58 %
	Jumlah	10.113.125.000	2.519.008.323	24,91 %

Berdasarkan alokasi anggaran Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Tahun 2024, pagu anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja setelah revisi adalah Rp 8.514.307.000 dari semula Rp. 11.224.419.000. Realisasi penyerapan anggaran pada masing-masing program sampai dengan tanggal Triwulan I Tahun 2024 adalah sebesar Rp 2.519.008.323 atau telah mencapai 24,91 %.



Gambar 7. Realisasi Anggaran BBPP Binuang Triwulan I Tahun 2024 (dalam persentase)

b. Analisis Nilai Kinerja Anggaran BBPP

Salah satu nilai kinerja Lembaga/Kementerian negara, termasuk UPT BBPP Binuang diukur dari bagaimana mengelola keuangan negara. Terdapat empat instrumen yang digunakan untuk mengukurnya, yaitu variabel capaian keluaran, realisasi anggaran, efisiensi, dan konsistensi rencana penarikan dana. Tiga variable merupakan variable independent, sementara satu variable, yaitu efisiensi, merupakan variable terikat, yaitu variable efisiensi. Efisiensi terikat dengan nilai realisasi anggaran dan nilai capaian keluaran. Sebagai instrument penilaian kinerja, berbagai alat ukur tersebut harus memenuhi kriteria alat ukur yang konsisten dan relevan.

Penghitungan efisiensi pada aplikasi Smart Kemenkeu yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Dasar hukum terkait penghitungan efisiensi terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran. Nilai NKA BBPP Binuang adalah sbb :



Nilai SMART
0.00
Sangat Kurang



Gambar 8. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BBPP Triwulan I Tahun 2024

Berdasarkan aplikasi Smart Kemenkeu, Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebagai keberhasilan Indikator Kinerja Outcome BBPP Binnang masih *on progress* dikarenakan belum tersedia data capaiannya oleh aplikasi Smart Kemenkeu.

Dari data Smart Kemenkeu tersebut dapat dihitung capaian kinerja sesuai target Perjanjian Kinerja (PK) dengan metode scoring sebagai berikut :

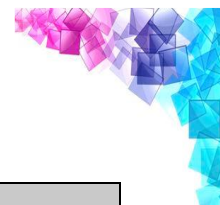
$$\text{Capain scoring NKA} = \text{Realisasi NKA} / \text{Target NKA} \times 100$$

C. Capain Perjanjian Kinerja

Berdasarkan sasaran strategis dan indikator outcome, capaian kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Kepala Badan PPSDMP dan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Binnang untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi, ditetapkan dengan rincian capain Triwulan I Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 7. Realisasi Perjanjian Kinerja BBPP Binnang TA 2021 - 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (2024)	Realisasi			
			2021	2022	2023	Maret 2024
(A) Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pertanian melalui pelatihan vokasi pertanian	Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya <i>(dalam Persen)</i>	85 %	82,80	91,11	90,89	93,33



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (2024)	Realisasi			
			2021	2022	2023	Maret 2024
(B) Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian	Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian (dalam Likert)	3,93	3,91	3,92	3,93	3,93
(C) Terwujudnya Birokrasi BBPP Binuang yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (dalam Nilai)	34,00	33,5	34,95	34,95	On progress
(D) Meningkatnya tata kelola anggaran BBPP Binuang	Nilai Kinerja Anggaran BBPP Binuang (dalam Nilai)	90,80	80,08	87,37	95,46	On progress

Berdasarkan Tabel 7 BBPP Binuang telah memenuhi semua kriteria perjanjian kinerja dimana semua indikator ; (A) Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pertanian melalui pelatihan vokasi pertanian, (B) Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian.

Indikator Kinerja persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya (dalam Persen) masih 93,33. Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian sebesar 3,93 (dalam Likert) sesuai dengan target PK.

Indikator Kinerja Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (C) masih On progress, dikarenakan capaian tersebut merupakan penilain dari pusat dan masih dilakukan perhitungan. Sedangkan nilai NKA (D) masih On progress belum terdata karena data rawnya belum tersedia oleh aplikasi Smart Kemenkeu.

D. Capaian Kinerja Lainnya

Selain 4 (empat) indikator perjanjian kinerja tersebut, yakni (A) Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pertanian melalui pelatihan vokasi pertanian, (B) Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian, (C) Terwujudnya Birokrasi BBPP Binuang yang efektif, efisien, dan berorientasi pada



layanan prima, (D) Meningkatnya tata kelola anggaran BBPP Binnuang, terdapat Capaian Kinerja Lainnya sepanjang Triwulan I Tahun 2024. Capaian indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1) Penerimaan Negara Bukan Pajak

BBPP Binnuang selain menggunakan dana Rupiah Murni (RM) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BBPP juga menggunakan dana PNPB. Kegiatan ini merupakan penerimaan negara bukan pajak yang disetorkan melalui Bendahara Penerima. PNPB meliputi Penerimaan Umum dan Fungsional. Penerimaan Umum meliputi: Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan; Penerimaan Kembali Belanja Pegawai/Barang/Modal TA yang lalu.

Sedangkan Pendapatan Fungsional meliputi Pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya; Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Tugas dan Fungsi, Perkiraan Penerimaan PNPB untuk Penerimaan Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan. Target penerimaan PNPB dari semula Rp 366.673.000 di awal Tahun 2024. Capaian kinerja penerimaan PNPB Triwulan I Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 8. Realisasi PNPB BBPP Binnuang Triwulan I Tahun 2024

No	Jenis Penerimaan	Jumlah (Rupiah)			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Penerimaan Fungsional					
1.	Pendapatan penjualan hasil pertanian. perkebunan. peternakan dan budidaya				
2.	Pendapatan Penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi	2.200.000			
3	Perkiraan penerimaan PNPB untuk penerimaan pendapatan layanan pendidikan dan/atau pelatihan				
Jumlah		2.200.000			
Jumlah Total		Rp 2.200.000			

Realisasi penerimaan PNPB Triwulan I Tahun 2024 sebesar Rp 2.200.000.



2) **Kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam program Kampus Merdeka**

Kampus Merdeka adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek dengan memberikan hak kepada Mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studi selama 1 semester dan berkegiatan di luar perguruan tinggi selama 2 semester. Perguruan tinggi diberikan kebebasan untuk menyediakan kegiatan Kampus Merdeka yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mahasiswanya.

Berikut jenis kegiatan yang tersedia di program Kampus Merdeka, yaitu:

- Magang Bersertifikat
- Studi Independen
- Kampus Mengajar
- Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA)
- Pertukaran Mahasiswa Merdeka
- Membangun Desa (KKN Tematik)
- Proyek Kemanusiaan
- Riset atau Penelitian
- Wirausaha

Pengalaman mahasiswa di kegiatan Kampus Merdeka akan berpengaruh besar terhadap kesiapan karir mahasiswa dengan cara memastikan mahasiswa terus menyimak perubahan dunia luar kampus selama berkuliah dan dapat kesempatan untuk menerapkan ilmu kepada masalah di dunia nyata khususnya di sektor Pertanian.

Hal ini senada dengan Tugas & Fungsi dari Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binnang yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah naungan Badan Penyuluhan & Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, yaitu mencerdaskan Sumber Daya Manusia di Bidang Pertanian. Atas dasar itulah, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari (Uniska) menjalin kerjasama Kampus Merdeka tersebut dengan wujud kegiatan praktek magang di BBPP Binnang Tahun 2024 yang akan berlangsung di Triwulan II 2024.



D. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Secara umum pelaksanaan kegiatan Triwulan I Tahun 2024 sudah terlaksana dengan baik namun masih mengalami hambatan/kendala yaitu :

- a. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Indikator Kinerja persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya (dalam Persen) masih 93,33. Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian sebesar 3,93 (dalam Likert) sesuai dengan target PK.

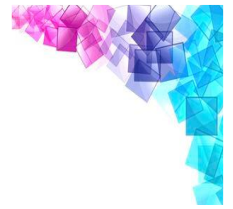
Indikator Kinerja Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (dalam Nilai) masih *On progress*, dikarenakan capaian tersebut merupakan penilaian dari pusat dan masih dilakukan perhitungan. Sedangkan nilai NKA masih *On progress* belum terdata karena data mentahnya pada aplikasi Smart Kemenkeu. Meski demikian ada beberapa masukan guna meningkatkan nilai NKA antara lain :

- Jadwal pelaksanaan kegiatan diharapkan konsistensinya sehingga berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu realisasi.
 - Terdapat refocusing anggaran yang perlu diperhatikan perubahan target sehingga berpengaruh terhadap realisasi capaian.
- b. BBPP Binnang siap untuk mensupport Kementerian Pertanian dalam menyongsong kegiatan pertanian sepanjang tahun 2024, lewat sejumlah rencana program dan kegiatan mempercepat swasembada pangan dengan gerakan LTT, yaitu Bimbingan Teknis Bagi Petani dan Penyuluh Mendukung Peningkatan Produktivitas Padi dan Jagung Pelatihan Subsistem Budidaya / Usahatani.
 - c. BBPP Binnang terus mengadakan tema pelatihan terupdate dengan perubahan kultur, seperti *smart farming*, *startup* dan *climate change* yang menjadi bukti keinginan kuat Kementan untuk memberikan kepedulian kepada insan pertanian melalui pelatihan sebagai mana arahan Bapak Menteri Pertanian (Mentan) Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P. Menteri Pertanian mendorong gerakan tanam padi pada Food Estate di Kalimantan Tengah guna mengakselerasi keberlanjutan pengembangan Food Estate lahan rawa sebagai lumbung pangan nasional, terlebih dalam menghadapi kondisi ketidakpastian akibat El Nino. Selain itu sesuai arahan Menteri Pertanian dalam menggenjot



pengembangan Food Estate ini tidak hanya menangani onfarm, tapi juga sisi hilir dan pasarnya.

- d. Sesuai arahan BPPSDMP Kementan dalam memberdayakan sektor pertanian beserta *stakeholders* milenial yang terlibat bahwa petani milenial mempunyai peran penting dalam melanjutkan pembangunan disektor pertanian. Melalui program YESS dan DPM/DPA BBPP Binnang diharapkan mampu menghasilkan wirausahawan muda pedesaan serta menghasilkan tenaga kerja yang kompeten di bidang pertanian yang tangguh dan berkualitas di area kerja Kalimantan pada khususnya. Untuk mencapai produktivitas pertanian yang tinggi, hal utama yang paling utama yaitu tersedianya SDM Pertanian yang unggul, andal, profesional, dan mandiri serta berjiwa enterprenur tinggi.
- e. Guna menggalang dukungan Instansi terkait yang berada di Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pelatihan berbasis program dan wilayah. dimana pesertanya dominan berasal dari wilayah Kabupaten/Kota setempat. maka optimalisasi fungsi koordinasi dan sosialisasi menjadi sangat penting perannya sebagai upaya untuk penyamaan persepsi terhadap penyiapan SDM dalam melaksanakan program pembangunan khususnya pertanian wilayah. dan diharapkan akan mendorong dukungan yang berujung partisipasi aktif semua jajaran di pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Demikian pula terhadap kemungkinan adanya share biaya dalam peningkatan SDM di daerah, dapat juga menjadi bahan pertimbangan sebagai bentuk sense daerah untuk peduli terhadap peningkatan kapasitas SDM di sektor pertanian. sehingga pada gilirannya pelaksanaan program pembangunan pertanian khususnya diwilayah Kabupaten/Kota akan menjadi gerakan bersama antara masyarakat, pemerintah dan swasta dalam menunjang tercapainya tujuan pembangunan khususnya disektor pertanian.
- f. Kami juga terus meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk menggali dan meningkatkan potensi pertanian di daerah masing-masing, termasuk juga kelembagaan P4S. Dengan demikian setiap daerah mampu dan dapat membuat proyeksi kebutuhan pangan dalam jangka menengah panjang demi mengantisipasi tantangan perubahan iklim yang mengancam produksi dan rantai pasok pangan ke depan.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja BBPP Binuang Triwulan I Tahun 2024 ini merupakan pelaporan serangkaian kegiatan beserta kinerja BBPP Binuang sebagai UPT Badan PPSDMP Kementan dengan wilayah kerja se-Kalimantan. Dalam rentang periode Januari s.d. Maret Tahun 2024, hasil pengukuran kinerja anggaran BBPP Binuang berdasarkan alokasi pagu Tahun 2024 adalah sebesar Rp 2.519.008.323 atau telah mencapai 24,91%.

Hasil pengukuran kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Badan PPSDMP Kementan dan BBPP Binuang untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh kedua instansi tersebut adalah sebagai berikut : (1) Capaian persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebesar 93,33 % dari target 85 %; (2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik = 3,93 likert dari target 3,93 likert (kategori mutu pelayanan sangat baik) dengan nilai SKM Unit Pelayanan sebesar 98,23 (kategori A = Sangat Baik); (3) Nilai Penilaian Mandiri Pelaksana Reformasi Birokrasi (PMP RB) serta (4) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) masih *on progress*.

Sedangkan capaian indikator kinerja lainnya sepanjang Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut: (1) Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP telah mencapai target Rp 2.200.000; serta (2) Kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam program Kampus Merdeka dengan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari (Uniska).

Demikian Laporan ini disusun sebagai instrumen monitoring kinerja BBPP Binuang sebagai unit kerja Badan PPSDMP Kementan. Kami berharap laporan kinerja tersebut dapat dipergunakan dengan baik sebagai evaluasi dan perbaikan kinerja pada periode mendatang.



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3, RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 7214/JKSPM
TELEPON (021) 7815380 - 7815480, FAKSIMILE (021) 7804386
SITUS : www.bppsdmp.pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Amin
Jabatan : Plt. Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dedi Nursyamsi
Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Desember 2023

Pihak Pertama

Muhammad Amin



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET	
1.	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pertanian melalui pelatihan vokasi pertanian	Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya	90%	Persen
2.	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian	Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian	3,94	Skala Likert (1-4)
3.	Terwujudnya Birokrasi BBPP Binuang yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai PMPRB BBPP Binunag	34,25	Nilai
4.	Meningkatnya tata kelola anggaran BBPP Binuang	Nilai Kinerja Anggaran BBPP Binuang	90,80	Nilai

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi Pertanian	Rp 4.806.335.000
2.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP	Rp 6.418.084.000
	Jumlah	Rp 11.224.419.000

Jakarta, 22 Desember 2023



Pihak Kedua

Dedi Nursyamsi

Pihak Pertama

Muhammad Amin

Lampiran 01. Persentase Sdm Pertanian Yang Meningkatkan Kapasitasnya Triwulan I TA 2024

Target IKSK 1 : 85.00
Realisasi : 93.33

No	Nama Pelatihan	Waktu Pelaksanaan Pelatihan	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta Menerapkan	Presentase Peserta Menerapkan
1	PELATIHAN ADAPTASI DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM	26 Februari - 01 Maret 2024	30	28	93.33
Jumlah			30	28	93.33

KETERANGAN

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Jumlah penerima layanan pelatihan di Bulan Maret 2024 yaitu 30 orang. Jumlah tersebut sama dengan bulan Februari dikarenakan belum ada pelatihan yang diselenggarakan di UPT BBPP Binuang di Bulan Maret 2024 tersebut.
2. Penilaian persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya diambil dari purnawidya Pelatihan Adaptasi Dan Mitigasi Perubahan Iklim dengan jumlah 30 peserta di mana telah terkirim eviden berupa implementasi foto penerapan pelatihan sebanyak 28 peserta.
3. Dengan nilai IKSK 1 sebesar 93,33 persen, persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya tersebut melebihi target perjanjian kinerja sebesar 85 persen (kategori Sangat Baik).
4. Sepanjang periode Triwulan I Tahun 2024 ini BBPP Binuang mampu mempertahankan kinerja dalam meningkatkan kapasitas SDM pertanian dengan capaian 93,33 persen.

Lampiran 02. Hasil Pengolahan Data IKM Triwulan I 2024

Berdasarkan hasil pengumpulan data periode Maret 2024, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 60 orang responden. Jumlah tersebut sama dengan bulan Februari dikarenakan belum ada pelatihan yang diselenggarakan di UPT BBPP Binuang di Bulan Maret 2024. Adapun rincian perhitungan nilai IKM sebagai berikut :

A. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BBPP Binuang Periode Maret Tahun 2024

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) BBPP BINUANG

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN (BBPP) BINUANG	
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN	
KEMENTERIAN PERTANIAN	
BULAN MARET 2024	
NILAI IKM	NAMA UNIT : BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN (BBPP) BINUANG
98	RESPONDEN
	JUMLAH : 60 Orang
	JENIS KELAMIN : L : 46 Orang P : 14 Orang
	PENDIDIKAN : SD : - Orang
	SLTP : - Orang
	SLTA : 12 Orang
	DI/DII/DIII : 3 Orang
	S1 : 45 Orang
	S2 Keatas : 2 Orang
	Periode Survey: 01 Jan 2023 s/d 31 Mar 2024
TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	

NILAI IKM UNIT PELAYANAN

A (Sangat Baik) : 88.31 - 100.00

B (Baik) : 76.61 - 88.30

C (Kurang Baik) : 65 - 76.60

D (Tidak Baik) : 25 - 64.99

B. Pengolahan Data Kuisisioner IKM BBPP Binuang Periode Maret Tahun 2024

Perhitungan	Nilai Per Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Jumlah Nilai Per Unsur	236	234	236	236	238	236	236	236	236
Nilai Rata Rata Per Unsur	3.93	3.90	3.93	3.93	3.97	3.93	3.93	3.93	3.93
Nilai Rata Rata Tertimbang Per Unsur (NRR per unsur x 0.1111)	0.44	0.43	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44
IKM Unit Pelayanan (Total NRT * 25)	98,32	3,93							
Mutu Pelayanan	A	Sangat Baik							

Keterangan :

- U1 : Persyaratan
- U2 : Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur
- U3 : Waktu Penyelesaian
- U4 : Biaya/Tarif
- U5 : Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
- U6 : Kompetensi Pelaksana
- U7 : Perilaku Pelaksana
- U8 : Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
- U9 : Sarana Dan Prasarana

C. Analisa Pengolahan Data IKM

Berdasarkan hasil pengolahan data periode Maret 2024, dapat diketahui bahwa :

1. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur mendapatkan nilai terendah yaitu 3,90, dikarenakan acara pelaksanaan pelatihan terlambat karena mesti mengumpulkan peserta dari berbagai tempat.
2. Sedangkan unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya/Tarif mendapatkan nilai tertinggi 3,97 dari unsur layanan, dikarenakan BBPP Binuang tidak mengenakan biaya saat pelaksanaan pelatihan.
3. Dengan nilai SKM 3,93 skala likert capaian mutu pelayanan tersebut sesuai dengan target perjanjian kinerja, sebesar 3,93 (100%) dan diharapkan sepanjang Triwulan I Tahun 2024 ini BBPP Binuang mampu mempertahankan kinerja pelayanan publik.